



**JUDUL TESIS :**

**POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK (TINJAUAN UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**

**Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum**

**Nama : TESH DIRGANTARA**

**NIM : 2010622023**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-2 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA**



**POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG  
SECARA ELEKTRONIK  
(TINJAUAN UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS  
PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN  
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**TESHA DIRGANTARA**

**2010622023**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah nyatakan dengan benar.

Nama : TESHA DIRGANTARA

NRP : 2010622023

Tanggal : 13 Januari 2023

Bila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Januari 2023



Yang Menyatakan,

TESHA DIRGANTARA

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TESHA DIRGANTARA  
NRP : 2010622023  
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK  
(TINJAUAN UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN  
HUKUM BERDASARKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Januari 2023

Yang menyatakan,



TESHA DIRGANTARA

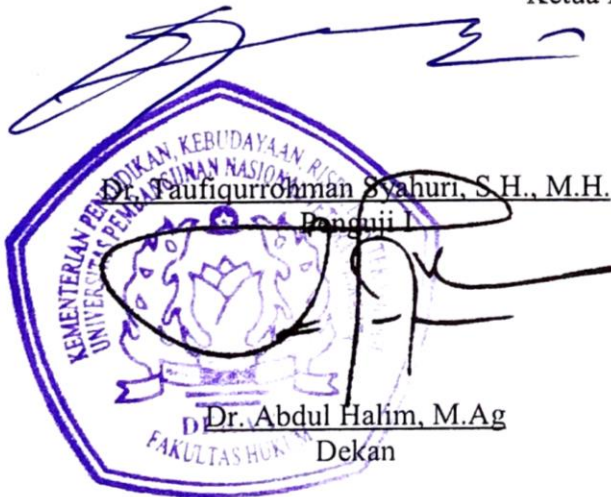
## PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :  
Nama : TESHA DIRGANTARA  
NRP : 2010622023  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Tesis : **POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG  
SECARA ELEKTRONIK (TINJAUAN UPAYA  
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN  
HUKUM BERDASARKAN TEORI  
EFEKTIVITAS HUKUM)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
Ketua Penguji



Dr. Abdul Halim, M.Ag  
Dekan



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.  
Penguji II / Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.  
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 13-01-2023

**POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG  
SECARA ELEKTRONIK  
(TINJAUAN UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS  
PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN  
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**

**TESHA DIRGANTARA**

**Abstrak**

Politik hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, baik secara global maupun dalam tatanan nasional, pada saat ini mengedepankan pengadaan secara elektronik, namun dalam penerapannya terutama dalam metode pengadaan langsung, masih belum sepenuhnya efektif diterapkan. Hal ini disebabkan karena masih dimungkinkannya pelaksanaan pengadaan langsung secara manual, walaupun seharusnya tetap dilakukan pencatatan secara elektronik. Namun pada kenyataannya, sebagian besar pelaksanaan pengadaan langsung masih belum dicatatkan secara elektronik. Menganalisis fenomena tersebut dengan Teori Efektivitas Hukum Anthony Allott dan Soerjono Soekanto, maka didapat beberapa faktor penyebab yang mendasari hal tersebut, diantaranya faktor budaya hukum masyarakat Indonesia yang belum terlalu lama memasuki masa demokrasi sehingga penerapan pengadaan barang/jasa yang sepenuhnya elektronik belum optimal mengingat masih terpengaruh budaya hukum pengadaan barang/jasa pada masa orde baru yang masih manual dan lebih tertutup. Selanjutnya faktor sumber daya manusia berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia pelaksana pengadaan barang/jasa tersebut seperti Pejabat Pengadaan yang belum merata, dan terakhir adalah faktor peraturan perundang-undangan yang masih berupa Peraturan Presiden sehingga belum mampu mendorong sepenuhnya pengadaan barang/jasa secara elektronik mengingat daya ikat perundang-undangan ini masih kurang kuat. Berkaitan dengan keadaan tersebut, kami menyarankan pendekatan sanksi/*reward* administratif, penguatan regulasi, dan pengintegrasian pengadaan barang/jasa dalam program-program nasional lainnya.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Efektivitas Hukum.

**ELECTRONIC DIRECT PROCUREMENT LEGAL POLITICS  
(REVIEW OF EFFORT TO IMPROVE EFFECTIVENESS  
OF LAW IMPLEMENTATION BASED ON  
THEORY OF LEGAL EFFECTIVENESS)**

**TESHA DIRGANTARA**

**Abstract**

The legal politics of government procurement, both globally and nationally, currently prioritizes electronic procurement, but in its application, especially in the direct procurement method, it is still not fully implemented. This is because it is still possible to carry out direct procurement manually, even though the recording should still be done electronically. However, in reality, most of the implementation of direct procurement is still not recorded electronically. Analyzing this phenomenon with the Legal Effectiveness Theory of Anthony Allott and Soerjono Soekanto, several causal factors are obtained that underlie this, including the legal cultural factors of Indonesian society who have recently entered the democratic period so that the implementation of fully electronic procurement is not optimal considering that they are still influenced by culture of the law on the goods/services procurement during the Orde Baru era which was still manual and more closed. Furthermore, the human resource factor is related to the lack of human resource for implementing the goods/services procurement, such as the uneven procurement officer, and lastly, the factor of statutory regulation that are still in the form of Presidential Regulation has not been able to fully encourage the goods/services procurement electronically considering that the binding power of these regulations is still not strong enough. In this regard, we recommend an approach of administrative sanctions/rewards, strengthening regulations, and integration of goods/services procurement in other national programs.

Keyword: Government Procurement, Legal Effectiveness.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak Januari 2022 ini adalah **POLITIK HUKUM PENGADAAN LANGSUNG SECARA ELEKTRONIK (TINJAUAN UPAYA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Dr. Anter Venus., MA., Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sekaligus sebagai Ketua Penguji Ujian Tesis;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan arahan kepada seluruh mahasiswa termasuk penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir;
4. Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selaku Pembimbing dan Penguji Ujian Tesis yang telah banyak memberikan ilmu, dukungan dan saran yang sangat bermanfaat selama bimbingan dan ujian tesis berlangsung;
5. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H., selaku Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan ilmu dan saran yang sangat bermanfaat selama ujian tesis;
6. Para dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Orang Tua Penulis Ayah Sudhi Adria Kusumah dan Ibu Cicih Sukaesih yang secara ikhlas tanpa pamrih telah membimbing, membesarkan dan menyayangi penulis sejak penulis kecil sampai sekarang penulis bekerja dan berkeluarga;



8. Teristimewa untuk keluarga kecilku istri Rika Aprilia Herliani dan kedua jagoanku Muhammad Azka Airlangga dan Denzie Liam Ahmad yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, do'a dan dukungannya untuk penulis segera menyelesaikan tugas akhir ini. Merekalah penyemangat penulis;
9. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman atas do'a dan dukungan yang telah diberikan; serta
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Hukum terkhusus rekan-rekan konsentrasi Hukum Kenegaraan yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum baik secara teori maupun praktik serta bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Jakarta, 13 Januari 2023

Penulis,



TESHA DIRGANTARA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	9
I.3. Tujuan Penelitian .....	9
I.4. Manfaat Penelitian .....	10
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	10
1.5.1. Kerangka Teori .....	10
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
II.1. Pengadaan Barang/Jasa.....	17
II.1.1. Sejarah Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	17
II.1.2. Pengertian dan Lingkup Pengadaan Barang/Jasa .....	22
II.1.3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.....	23
II.1.4. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa .....	28
II.1.5. Etika Pengadaan Barang/Jasa .....	29
II.1.6. Tren Pengadaan Barang/Jasa .....	31
II.1.7. Pengadaan Barang/Jasa Metode Pengadaan Langsung.....	34
II.2. Tinjauan Hukum Tentang Teori Efektifitas Hukum.....	38
II.2.1. Efektivitas Hukum Berdasarkan Anthony Allott.....	38
II.2.2. Efektivitas Hukum Berdasarkan Soerjono Soekanto.....	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
III.1. Tipe Penelitian .....	48
III.2. Sifat Penelitian .....	48
III.3. Sumber Data.....	48
III.4. Teknik Pengumpulan Data.....	49
III.5. Metode Pengumpulan Data.....	49
III.6. Metode Analisis Data.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	52
IV.1. Penerapan Norma Hukum Pengadaan Langsung Secara Elektronik.....	52
IV.1.1. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa.....	52
IV.1.2. Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pada Berbagai Peraturan Perundang-undangan.....	55
IV.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Langsung yang dilakukan secara Elektronik.....	64
IV.2. Efektivitas Penerapan Hukum Pengadaan Langsung Secara Elektronik dihubungkan dengan Teori Efektivitas Hukum .....	65
IV.2.1. Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum Anthony Allott.....	65
IV.2.2. Berdasarkan Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto .....	71
 BAB V PENUTUP.....	 77
V.1. Kesimpulan.....	77
V.2. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA .....	 82
RIWAYAT HIDUP.....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Nasional Tahun 2020, 2021, dan 2022.....	8
Tabel 2	Perbandingan Perkembangan Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .....	22
Tabel 3	Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Langsung Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2020, 2021, dan 2022. ....	66
Tabel 4	Persebaran Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	PPK membuat Paket Non Tender (Pencatatan Pengadaan Langsung).....	62
Gambar 2	PPK memilih paket Pengadaan Langsung yang telah diumumkan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) .....	63
Gambar 3	PPK menambah realisasi belanja Pengadaan Langsung .....	63
Gambar 4	PPK melengkapi data realisasi belanja Pengadaan Langsung .....	64
Gambar 5	PPK mengisi data Penyedia yang telah terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan Non SIKaP .....	64
Gambar 6	PPK menyelesaikan Pencatatan Pengadaan Langsung .....	65
Gambar 7	Peta Sebaran Server Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).....	72